

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu asas pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan daerah adalah desentralisasi. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip seluas –luasnya, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar – benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. (Renyowijoyo 2013, hlm.116)

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Hal ini dilakukan agar mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan saing daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Menurut Sumarsono, dan Utomo (2009) menyebutkan bahwa antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi mempunyai kemungkinan kondisi desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan, desentralisasi fiskal mempunyai dampak meningkatkan instabilitas makro ekonomi sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan, desentralisasi fiskal untuk suatu daerah bisa berdampak positif ataupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut tergantung kesiapan kelembagaan daerah tersebut dalam menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal.

Implementasi pelaksanaan desentralisasi fiskal, dapat di telaah melalui alokasi penerimaan dana perimbangan, seperti yang di terima oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni bahwa DBH sebesar 14,5 milyar pada tahun 2001 dan naik menjadi sebesar 36,1 milyar pada tahun 2009 atau rata – rata kenaikan setiap tahun sebesar 3,9%. Selanjutnya DAU sebesar 126,4 milyar pada tahun 2001 dan naik menjadi 366,1 milyar pada tahun 2009 atau rata – rata kenaikan setiap tahun sebesar 4,25%. Begitu pula DAK yang besarnya 2,1 milyar pada tahun 2001 dan naik menjadi 15,2 milyar pada tahun 2009 atau naik rata – rata setiap tahun 3,33%. Melalui penerimaan dana perimbangan di atas, pembangunan untuk kepentingan publik pada periode 2001/2002 sebesar 12,93% dan turun pada periode 2008/2009 sebesar (5,42%). Akibat turunnya alokasi pembiayaan pembangunan dapat berpengaruh pula pada kegiatan investasi swasta. Kegiatan investasi swasta pada periode 2001/2002 sebesar 9,89% turun pada periode 2008/2009 yakni sebesar(5,07%). Kontribusi investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah tahun 2001 sebesar 9,89% dan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar (5,07%). Hal ini dapat dilihat pada tingkat pertumbuhan ekonomi selama periode 2001/2002 sebesar 16,6% turun pada periode 2001/2002 sebesar (12,10%) (BPS Sulteng, 2009).

Menurut ketentuan umum UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah Dana Alokasi Umum yang disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar – daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penelitian sebelumnya antara lain: Maryati dan

Endrawati (2010) menyatakan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini berarti bahwa semakin tinggi DAU yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena peran DAU sangat signifikan, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU. Setiap DAU yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya untuk belanja modal. Namun, menurut Santosa (2013) menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum atau (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan porsi DAU dari pemerintah pusat tergolong sangat besar, untuk itu seharusnya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber pendanaan tersebut bukan hanya untuk pengeluaran rutin seperti belanja pegawai saja, akan tetapi juga untuk pembangunan daerah.

Menurut ketentuan umum UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam penelitian sebelumnya antara lain: Variabel Independen Dana Alokasi Khusus (DAK), Santosa (2013) mengungkapkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini terjadi karena besar dan kecilnya dana perimbangan yang dialokasikan pada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, namun, dalam penelitian lain Maryati dan Endrawati (2010) mengatakan, variabel Independen Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini terjadi dikarenakan nilai DAK yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan dan lain – lain, yang berarti tidak boleh disalahgunakan atau digunakan untuk kegiatan diluar ketentuan.

Menurut ketentuan umum UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah peghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam penelitian sebelumnya antara lain: Husna dan Sofia (2013) menyatakan bahwa variabel Independen Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini terjadi karena peneliti tidak melakukan penelitian yang lebih luas lagi, sehingga data yang terkumpul tidak lebih banyak dan tidak lebih mengendral dan kurang mendekati teori. Namun, menurut Tajuddin, dkk (2014) menyatakan bahwa variabel Independen Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Budi Santosa (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Santosa (2013) adalah peneliti mengubah metode analisis yang digunakan menggunakan uji regresi *linier* berganda karna pada penelitian Budi Santosa(2013) menggunakan metode *Path Analysis*. Adapun perbedaan lainnya dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui www.djpk.depkeu.go.id dan www.bps.go.id dengan periode tahun yang baru yaitu 2011 – 2013, dalam penelitian ini juga sampel yang digunakan hanya Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Dari hasil penelitian yang terjadi mendorong saya untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI”**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi ?

- b. Apakah Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui secara empiris analisis Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- b. untuk mengetahui secara empiris analisis Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak, antara lain :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat penelitian sebelumnya dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Serta diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu khususnya mengenai Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang Analisis Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, yang pengukurannya didasarkan pada atribut berbasis akuntansi pemerintah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam APBD. Selain itu, penelitian ini juga menambah

pengalaman bagi peneliti dalam menganalisis dan memecahkan masalah dengan ilmu yang di dapat selama perkuliahan.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai faktor – faktor yang bisa mempengaruhi praktik dalam Pertumbuhan Ekonomi bagi pemerintah daerah. Penelitian ini juga diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam membuat anggaran APBD yang lebih efektif dan efisien sehingga dalam merealisasikan anggaran tersebut dapat tepat sasaran yang sesuai dengan kepentingan publik dan dapat menarik para investor sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan ketertarikan untuk daerahnya, serta dapat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintahan Provinsi dalam mengambil Kebijakan khususnya mengenai komponen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil pada pemerintah di provinsi.

c. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor dalam pertimbangan menginvestasikan dana dan melakukan usaha ke daerah – daerah yang berpotensi sehingga pendapatan daerah bertambah.